



Buletin Parlementaria

Nomor 1030/IV/X/2018 • Oktober 2018



**RUU Pesantren dan
Pendidikan Keagamaan
Disetujui jadi
RUU Inisiatif DPR**



Komisi V Pastikan Instrumen BMKG Layak dan Berfungsi

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disetujui jadi RUU Inisiatif DPR



Pimpinan DPR, Ketua Baleg didampingi Wakil-wakil Fraksi foto bersama setelah persetujuan RUU PPK

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Persetujuan diberikan sepuluh fraksi DPR yang disampaikan melalui juru bicara (jubir) masing-masing, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).

Sebelum masing-masing jubir diberi kesempatan menyampaikan pandangannya selama lima menit, namun ada usulan opsi lain agar pandangan fraksi diserahkan langsung kepada Pimpinan Rapat Paripurna, tanpa dibacakan. Akhirnya pendapat fraksi-fraksi diserahkan kepada Pimpinan Rapat Paripurna Utut Adianto yang didampingi Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

“Apakah dengan diteruskannya pandangan fraksi-fraksi tersebut, Rapat Paripurna dapat menyetujui naskah RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR? tanya Utut yang disambut kata “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir dan palu diketok tanda pengesahan akan dibahasnya RUU tersebut ke tingkat selanjutnya.

Ke sepuluh jubir fraksi yang

menyerahkan pandangan fraksi-fraksi tersebut adalah Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-Perjuangan, Mohammad Suryo Alam dari Fraksi Partai Golkar, Anda dari Fraksi Partai Gerindra, Khatibul Umam Wiranu dari Fraksi Partai Demokrat dan Ali Taher dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Berikutnya Ibnu Multazam dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ledia Amaliah Hanifa dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Fauzan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Titik Prasetyawati Verdi dari Fraksi Partai NasDem dan Sudiro Asno dari Fraksi Partai Hanura.

Ditemui usai Rapat Paripurna, Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan, RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan merupakan upaya negara dalam memberikan landasan hukum untuk pengembangan dan penguatan bagi pesantren dan pendidikan agama. Sebab saat ini,

pesantren masih dianggap sebagai lembaga informal.

“RUU ini diharapkan akan menjadi landasan hukum dalam langkah pemerintah untuk dapat berkontribusi lebih terhadap upaya pengembangan dan penguatan pesantren. Kita berharap pemerintah segera merespon hasil Rapat Paripurna ini. Caranya dengan menunjuk menteri yang akan terlibat dalam pembahasan RUU itu,” ungkap Diah.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, pemerintah dapat memberikan kontribusi lebih dengan hadirnya UU ini. Apalagi, dengan melihat peran pesantren sebagai bagian penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Ia berkomitmen pihaknya akan mendukung penuh RUU ini untuk penguatan dan kemajuan pesantren, dan memberikan ruang untuk masukan dari berbagai kalangan untuk RUU ini. ■

mp,eko/sf



Foto: Runiti Iod

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Anggota Komisi III DPR RI Abdul Kadir Karding pada diskusi Forum Dialektika

Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengusulkan Lapangan Tembak Perbakin di Kawasan Senayan, Jakarta untuk dipindah. Hal ini menyusul terjadinya peluru dari salah seorang anggota Perbakin yang sedang latihan menyasar ke Gedung DPR RI. Tepatnya di lantai 13 ruang Anggota DPR RI Bambang Heri Purnama (F-Golkar) dan di lantai 16 tepatnya ruang Wenny Warouw (F-Gerindra).

Fahri mengisahkan, konsep penataan DKI Jakarta itu sendiri dahulu kala diimajinasikan oleh Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, seperti Washington DC. Dimana di dalamnya mengatur lokasi dari lembaga negara yang ada dalam trias politika, yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif, atau *The Brain of Nation*, yang artinya otak dari negara ini ada pada ketiga lembaga negara itu.

"Namun sekarang sudah tidak ada yang mengatur hal itu. Termasuk 278 hektar kawasan Senayan yang kacau penggunaannya. Masak mendirikan Lapangan Tembak di dekat Gedung DPR. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Lapangan Tembak itu dipindah atau DPR yang dipindah," papar Fahri dalam Forum Dialektika bertema "Regulasi Kepemilikan Senjata, Antara Olahraga dan Petaka?" di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (16/10).

Tidak hanya itu, Fahri juga menilai sejatinya tidak boleh ada gedung lain di sekitar kawasan DPR RI yang lebih tinggi dari Gedung DPR RI. Hal itu menandakan kedaulatan rakyat yang memang lebih tinggi dari segalanya. Bahkan jika ada gedung yang lebih tinggi dari DPR RI, secara otomatis harus dirubuhkan. Hal itu yang menurut Fahri harus ditegakkan kembali, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Mengingat kasus peluru nyasar ini bukan yang pertama kalinya terjadi. ■ ayu/mp/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah, Geraldio Opie

ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Eko Priyanto, S.E. (Plt. Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki di ruang kerjanya

Foto: Jayadi | oc

DPR Komitmen Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa DPR RI tetap komitmen mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan berada satu penderitaan dengan rakyat Palestina. Ia memastikan, DPR RI mengecam keras tindakan Australia yang berencana memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jika hal ini sampai terjadi, akan semakin memperburuk kondisi perdamaian dunia dan bisa membuat keamanan dunia kembali bergolak.

“DPR RI memberikan dukungan penuh dan terus berada dalam satu penderitaan dengan rakyat Palestina. Kami mengecam tindakan Australia, dan meminta Australia mempertimbangkan kembali pemindahan kedutaan besarnya, karena itu merupakan bentuk pengakuan. Tidak hanya melanggar hukum internasional, tapi juga berpotensi mengganggu perdamaian dunia yang kita jaga bersama,” tegas Ketua DPR RI usai menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (17/10).

Legislator yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina dalam memperjuangkan

kedaulatan tanah airnya bukan hanya dilakukan kali ini saja. Namun, telah dilakukan sejak puluhan tahun silam, melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Termasuk untuk saat ini, dimana Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.

“Kita tak akan gentar berhadapan dengan negara adikuasa seperti Amerika yang memiliki hak veto di PBB, maupun sekutu Israel lainnya. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia akan pastikan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina akan terus digelorakan dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tegas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, sejalan dengan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI dan parlemen Palestina sudah membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) sehingga dapat memperkuat hubungan persahabatan parlemen kedua negara. Selain itu, di berbagai forum Parlemen seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia (MIKTA), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), DPR RI selalu mengajak parlemen negara lain ikut serta mendesak Israel menghentikan tindakan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina.

“Di berbagai forum parlemen tersebut, DPR RI mengemukakan keras penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina yang sedang melakukan demonstrasi di Gaza. DPR RI juga menolak dan menentang keras pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. DPR RI menentang pula perluasan pemukiman dan pembatasan akses di kompleks Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh Israel,” jelas Bamsoet.

Selain meningkatkan hubungan politik, Bamsoet dan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Maliki juga sepakat untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia - Palestina yang pada tahun 2017 mencapai 2,39 juta dolar Amerika Serikat harus dapat ditingkatkan lagi di tahun mendatang.

“Untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan bangsa Palestina, Indonesia akan membebaskan bea masuk bagi produk Palestina. Sehingga neraca perdagangan kedua negara bisa berimbang. Data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia ke Palestina sepanjang 2017 sebesar 2,05 juta dolar AS. Sementara nilai impor produk dari Palestina antara lain kurma, bernilai 341 ribu dolar AS. Surplus untuk Indonesia sebesar USD 1,7 juta,” papar Bamsoet.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menambahkan bahwa pihaknya akan menggunakan jalur Parlemen, seperti menggelar pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Parlemen Australia untuk membatalkan rencananya memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

“Kami memahami dinamika politik yang berkembang di Australia mendekati Pemilu. Tapi hal itu jangan dijadikan komoditas untuk mendapatkan suara dalam internal pemerintahan Australia, karena akan mengganggu stabilitas regional dan hubungan bilateral, khususnya Indonesia dan Australia. Kami berharap Pemerintah Australia mau menerima pendapat Indonesia, dan membatalkan rencana pemindahan kedubesnya,” harap legislator Partai Golkar itu.

Dijelaskannya juga banyak mekanisme yang bisa disampaikan DPR RI untuk mengutarakan hal tersebut kepada Australia. Selain menggelar pertemuan antar Ketua Parlemen, yakni melalui forum Inter-Parliamentary Union (IPU). Pada kesempatan itu pihaknya akan menyampaikannya secara resmi. Bahkan Komisi I DPR RI bisa menyampaikan ke Kedubes Australia di Indonesia. ■ Ayu/mp/sf



Foto: Jaka | ioc

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto memimpin Rapat Paripurna

Paripurna DPR Sepakati Perubahan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014

Rapat Paripurna menyepakati Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Meskipun sebelumnya sempat diwarnai skors untuk forum lobi, namun setelah 30 menit 10 Fraksi di DPR RI menyepakati perubahan tersebut. Wakil Ketua DPR Utut Adianto sebagai pemimpin sidang membuka skors. Selanjutnya, Utut menanyakan kepada para Anggota Dewan Rapat tentang kesepakatan Perubahan Tata Tertib tersebut.

“Apakah semua menyetujui perubahan ini?” tanya Utut. “Setuju,” jawab Anggota Dewan yang hadir dalam rapat. Utut kemudian mengetuk palu sebagai tanda kesepakatan rapat paripurna lalu selanjutnya menutup rapat. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).

Tatib tersebut menitikberatkan tentang aturan teknis tentang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), tentang penetapan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Dalam tatib tersebut Anggota BAKN berjumlah paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sesuai jumlah fraksi yang ada di DPR.

Dalam tata tertib tersebut juga diubah soal fungsi dan kewenangan

MKD. Selain itu juga ada aturan mengenai Panitia Angket di DPR yang diubah. Perubahan Tata Tertib DPR No 1 tahun 2014 itu juga dibacakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas. Supratman menyebut pembahasan perubahan Tata Tertib telah dilakukan secara mendalam di Panja. “Tentang Tata Tertib telah dibicarakan secara mendalam dan intensif. Pembahasan sudah dibahas di Panja secara mendalam,” ungkapinya.

Sebelumnya, PKB, PKS, dan Golkar meminta penundaan kesepakatan karena masih membutuhkan kajian mendalam, namun setelah ada forum lobi akhirnya seluruh fraksi di DPR sepakat. “Kami meminta waktu untuk melakukan diskusi,” kata anggota DPR F-Golkar, Aziz Syamsuddin.

■ eko/mp

Sengketa Faskes Khusus TNI Harus Segera Diselesaikan

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menyarankan Komisi I untuk membuat surat secara terbuka kepada Presiden dalam rangka membantu menyelesaikan masalah sengketa pemberhentian sepihak rujukan *online* ke Fasilitas Kesehatan (Faskes) TNI dan Kementerian Pertahanan sehingga mereka tidak dapat berobat langsung ke Faskes masing-masing.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Kematian Kementerian Pertahanan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Direktur Utama PT. Asabri, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di ruang rapat Komisi I DPR RI, Selasa (16/10).

“Kita bersurat saja pimpinan, atas nama Komisi I DPR RI agar Presiden segera mengadakan Ratas (rapat terbatas) mengundang institusi terkait membahas hal ini, segera mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) khusus atau peraturan turunan. Ini kalau kita biarkan ya tahun depan begini lagi

pasti,” tegas politisi PDI-Perjuangan ini.

Ia menambahkan bahwa TNI harus mendapatkan perlakuan khusus atas segala dedikasi mereka menjaga kedaulatan Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara maju, seluruh anggota militer di sana menurutnya telah mendapatkan pelayanan kelas satu.

“Kita lihat saja veteran-veteran perang dari Irak itu pelayanannya nomor satu, fasilitasnya luar biasa. Saya rasa kita harus bersyukur bahwa saat ini kita tidak terlibat dalam konflik jangka panjang yang melibatkan prajurit dalam jumlah banyak. Tidak terbayang kalau di sini ada konflik seperti itu sedangkan pelayanannya seperti ini bagaimana nasib kita,” jelasnya.



Foto: Geraldini | iodi

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris.

Ke depan Diharapkan Tidak Ada Pemungutan Suara Ulang

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menganggap pelaksanaan kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2018 cukup berhasil, namun menyisakan beberapa catatan yang harus diperbaiki ke depan.

“Dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2018, terdapat lima hingga enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ini menandakan secara persentase, pelaksanaan Pilkada 2018 berhasil walaupun ada catatan,” ungkap Amali di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10).

Walaupun beberapa TPS pada akhirnya harus melaksanakan PSU, menurut legislator F-Golkar, hal tersebut tidak serta merta menciderai penilaian

secara keseluruhan terhadap pelaksanaan Pilkada 2018.

“Artinya kalau ada PSU berarti ada gugatan, kalau ada gugatan, berarti ada masalah. Nah kita berharap bahwa ke

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu atas terlaksananya pilkada serentak 2018

depannya tidak ada masalah lagi tentang pelaksanaan Pilkada serentak ini,” harap legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Saat memimpin Rapat Kerja dengan Dirjen Menteri Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pimpinan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Amali didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria, Herman Khaeron serta Nihayatul Wafiroh.

Pada salah satu poin kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu atas terlaksananya pilkada serentak 2018 di 171 daerah yang telah berlangsung dengan aman dan tertib. ■

es/mp

Di lain sisi, anggota Komisi I lainnya, Taufiq R. Abdullah menyebut bahwa penyebab persoalan ini menitikberatkan pada masalah regulasi dan tidak perlu mengeluarkan Perpres, cukup hanya dibahas di tingkat Kementerian saja. Menurutnya, tidak bisa persoalan tersebut hanya dilimpahkan kepada BPJS.

“Ini bukan wilayahnya BPJS untuk menyelesaikan persoalan begini, jadi kita tidak boleh menghakimi BPJS. Yang harus dihakimi adalah Kementerian Kesehatan. Mereka hanya pelaksana dan levelnya jauh di bawah Menteri bahkan Presiden,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Kemudian politisi dapil Jateng VII ini juga mengimbau kepada elemen dari Kementerian Kesehatan agar berinisiatif untuk membuat peraturan di atas pedoman yang sedang dibahas saat ini. Ia menyarankan untuk dibuat Peraturan Menteri Kesehatan karena tidak perlu melibatkan banyak pihak.

“Apapun itu namanya mungkin Permenkes yang paling tepat, karena kalau Peraturan Presiden nantinya akan melibatkan banyak pihak. Jadi saya sarankan disegerakan saja agar para anggota TNI pada akhirnya bisa mendapatkan pelayanan secara khusus,” tutupnya. ■ eps/mp



Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali.

Foto: jayadi | ioc

Peluru Nyasar, Wenny Warouw Serahkan Penyelidikan pada Polisi

Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw mendapati peluru yang menyasar ke ruang kerjanya, di Gedung Nusantara I DPR RI lantai 16. Bahkan, peluru itu hampir mengenai tamunya. Ia pun menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap fakta di balik penembakan yang hampir mengenai tamunya itu.



Anggota Komisi III DPR RI Wenny Warouw.

Foto: Andri | ioc

“Biarkan reserse yang membuktikan. Mudah-mudahan proyektil yang di lantai 16 dan 13 ketemu, bisa dilacak itu *sniper* dari jenis senjata apa, serta pemilik *sniper*nya. Di negara ini kan hanya beberapa orang saja atau beberapa satuan saja yang memiliki *sniper*,” terang Wenny kepada awak media di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/10).

Bila melihat dari lobang tembakan yang sempurna saat menembus kaca, Wenny berkeyakinan peluru tersebut berasal dari *sniper*. Walaupun dari jarak lima ribu meter, proyektil yang keluar dari moncong senjata *sniper* masih bisa menembus dinding atau kaca dengan sempurna.

“Karena dari Perbakin juga sudah melihat perkenaan dan tembusan kaca serta tembusan ke plafonnya itu sempurna banget. Jadi betul-betul tembakan yang profesional,” ungkap legislator Partai Gerindra itu.

Wenny mengisahkan, penembakan itu terjadi saat ia menerima tamu di ruang kerjanya tepat pada pukul 14.35 WIB. “Jadi kami bertiga di situ, kemudian dua hingga tiga menit, kaca meledak, dan dilihat ada plafon yang bocor. Saya langsung tiarap, terjadi sangat singkat,” tutur Wenny.

“Setelah itu kita lihat situasinya, (peluru melesat) kira-kira 10 cm dari kepala tamu saya. Dari kemiringan lubang yang menembus kaca, diperkirakan peluru datang dari arah jalan Palmerah,” analisa Wenny.

Wenny sendiri tidak mau mengaitkan kejadian ini dengan kondisi politik dalam negeri. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengungkap faktanya.

Selain itu, pada waktu yang hampir bersamaan, ruang kerja Anggota Komisi III DPR RI Bambang Heri Purnama juga mengalami kejadian serupa. Peluru nyasar tersebut menembus kerudung dan nyaris mengenai kepala staf ahli Bambang Heri yang sedang berada di ruangnya. ■ es/sf

PUGAR Diharapkan Tingkatkan Produksi Garam Nasional



Foto: Suci | od.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi panen raya garam di Desa Sedayu Lawas, Lamongan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengharapkan Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam, juga dapat meningkatkan produksi garam nasional.

“Di Lamongan ada petani garam penerima PUGAR dari KKP. Program ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani garam dan terutama untuk menambah produksi garam nasional,” kata Viva usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI panen raya garam di Desa Sedayu Lawas, Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Selasa (16/10).

PUGAR merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional yang masuk dalam prioritas keempat tentang penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut legislator PAN ini menjelaskan, di Lamongan sedang dikerjakan Sistem Integrasi Tambak Garam Rakyat.

“Artinya seluruh lahan milik petani garam dijadikan satu agar efektif dan

efisien serta dapat meningkatkan produksi dengan menggunakan metode Geomembran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan produksi di Lamongan,” jelasnya.

Legislator dapil Lamongan ini menegaskan bahwa PUGAR ini merupakan program yang bagus dari pemerintah. Ia berharap bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan perlindungan petani garam ini bisa terus ditingkatkan.

“Bantuan intensif dari pemerintah sangat diperlukan dalam rangka untuk perluasan lahan, pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas agar garam rakyat ini bisa menjadi produksi nasional dan diharapkan tidak akan impor lagi ke depannya,” harapnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus mendorong agar garam rakyat ini bisa mandiri tidak impor dengan cara petani garam rakyat ini diberdayakan dan dilindungi serta diberikan subsidi, diberikan kemampuan untuk pengembangan teknologi dan utamanya dalam kerangka untuk perlindungan harga. Jangan sampai di saat panen harga turun dan di saat tidak panen harga naik.

“Dalam rangka stabilitas harga pemerintah harus hadir dalam rangka perlindungan petani garam agar mereka terus berproduksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani garam,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Fadeli mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV DPR. Menurutnya Lamongan memiliki potensi yang luar biasa namun jika tidak ada sentuhan pemerintah pusat tidak akan jadi apa-apa.

“Kami di pemerintahan Lamongan sangat terbatas, paling kami membangun

jalan kecil-kecil dan membangun gudang garam tidak akan sebesar ini. Oleh karena itu kami mengharapkan sentuhan-sentuhan teknologi dan dukungan dari DPR dan pemerintah pusat bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani garam yang sekarang ini koperasinya dibantu untuk pembangunan gudang walaupun gudang yang akan dibangun ini baru seluas 600 meter," paparnya.

Dirinya yakin ke depan akan menjadi lebih luas. Lebih lanjut ia menyatakan ini adalah sebuah embrio, dimulai dengan membantu gudang koperasi kemudian ke depan membantu produktivitas petani garam di Kabupaten Lamongan. Diharapkan bantuan yang diberikan tidak berhenti di sini tapi di seluruh Indonesia bagi kesejahteraan petani garam.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi yang turut serta mendampingi Tim Kunker Komisi IV menjelaskan, PUGAR yang dikembangkan KKP salah satunya melalui Sistem Integrasi Lahan Garam, tahun ini untuk Lamongan para pemilik lahan dan petambak garam sudah berhasil dintegrasikan seluas 23 hektar.

"Diharapkan dengan potensi yang besar saat ini lahan garam yang ada di Lamongan yang aktif adalah sekitar 205 hektar dan lahan yang ada yang berpotensi untuk dijadikan lahan garam sekitar 800 hektar. Dari 205 hektar tadi terinformasi hari ini produksi sudah mencapai 23.150 ton. Artinya per hektar sekitar 112 ton. Ini sangat baik dan KKP tahun ini memberikan bantuan berupa Gudang Garam dan Geomembran untuk petambak garam dan juga integrasi lahan," katanya.

Ia mengharapkan dari 205 hektar tersebut ke depan harus ada satu koperasi untuk petambak-petambak garam sehingga integrasi lahan bisa dilanjutkan. Dan ketika integrasi lahan ada diharapkan ada tanah dari petambak garam untuk bisa dibangun gudang garam. "Jadi, gudang garam ini tidak hanya satu tapi tergantung dari petani dan petambak garam serta koperasi yang dibentuknya serius kita juga serius," ungkapnya.

Sebelum meninjau panen raya garam, Tim Komisi IV DPR, Dijen Pengelolaan Ruang Laut KKP bersama Bupati Lamongan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gudang garam seluas 600 meter, memberikan bantuan truk pengangkut garam untuk koperasi petani garam dan bantuan lainnya. ■ sc/mp

Para Nelayan Gorontalo Mendapat Bantuan

Banjir bantuan diberikan kepada para nelayan di Gorontalo. Bantuan akses dana hingga mobil berpendingin, mengalir kepada para nelayan. Kebetulan komoditas utama Gorontalo di sektor perikanan adalah tuna dan udang. Dengan bantuan ini diharapkan komoditas ikan tangkap kian berkualitas untuk diekspor.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono memberi bantuan kepada para nelayan di Kabupaten Gorontalo.

Foto: Husen | lod

Demikian mengemuka saat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono memberi bantuan simbolis kepada para nelayan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Selasa (16/10). Selain dihadiri para Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, acara juga dihadiri Dirjen Daya Saing Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pejabat daerah setempat. Acara ini merupakan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI untuk melihat dari dekat produksi dan akses logistik ekspor ikan di Gorontalo.

Roem yang kebetulan berasal dari dapil Gorontalo sangat antusias menyalurkan bantuan pemerintah pusat ini kepada para nelayan. Selain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, bantuan juga diberikan BRI kepada nelayan setempat untuk meningkatkan mutu ekspor ikan asal Gorontalo. "Senang melihat banyak bantuan mengalir ke Gorontalo. Nanti akan ada bantuan lagi berupa kapal dan jejaring," ungkap Roem.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok nelayan yang memiliki komoditas tertentu. Bantuan modal usaha besarannya beragam mulai dari ratusan juta hingga milyaran rupiah per kelompok nelayan. Anggota F-PG ini berharap agar Pemda setempat membuat terobosan dan inovasi baru bagi para nelayan untuk peningkatan mutu ikan tangkap sekaligus peningkatan kesejahteraan para nelayan.

Sementara Dirjen Daya Saing Perikanan KKP, mengemukakan bahwa terbatasnya akses logistik membuat komoditas ikan tangkap tidak maksimal di Gorontalo. Sementara konsumsi ikan di Gorontalo pada 2018 baru 30 kg per kapita per tahun. Padahal, targetnya 50 kg per kapita per tahun. ■ mh/mp

Komisi IV Dorong Kementan Berantas WBC di Musi Rawas

Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) serta pihak terkait lainnya untuk memberantas Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) atau hama Wereng Batang Coklat (WBC) di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pasalnya, wabah hama wereng di Musi Rawas setidaknya sudah terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Bahkan, wabah ini juga berdampak pada hasil produksi gabah yang dihasilkan petani.

Di Musi Rawas ini, dalam lima tahun terakhir terkena hama wereng. Kementan sudah mencoba berbagai cara. Tentu ini ada masalah, dan akan kita perbaiki,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Desa P1. Mardiharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumsel, Selasa (16/10).

Tim Kunspek Komisi IV DPR RI disambut langsung oleh Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan, Wakil Bupati Musi Rawas Suwarti, jajaran Dinas Pertanian Provinsi Sumsel maupun Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas, penyuluh pertanian, serta puluhan petani yang tergabung dalam sejumlah kelompok tani se-Musi Rawas. Para petani terlihat antusias dengan kehadiran Komisi IV DPR RI.

Darori mengatakan, dari hasil paparan, salah satu langkah yang diambil Kementan dan Dinas Pertanian Sumsel dengan memberikan benih Inpari kepada petani. Penyemprotan pestisida pun sudah dilakukan. Namun, padi Inpari pun masih tetap diserang wereng. Untuk itu, legislator Partai Gerindra itu mendorong agar langkah yang sudah ada kembali diperkuat. Misalnya dengan menambah volume obat dan pestisida, sehingga hama wereng tidak menyebar lagi.

“Kemudian, jenis padinya juga harus ada penelitian lagi. Padi jenis Inpari masih juga dimakan wereng, sehingga harus menggunakan padi jenis baru, yang lebih tahan terhadap hama wereng. Saya harapkan ada penelitian dari Litbang Kementan, misalnya bekerjasama dengan perguruan tinggi seperti IPB dan UGM,

sehingga bisa mengatasi masalah ini. Dan produksi gabah kembali meningkat,” harap legislator dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kunjungan Tim Kunspek Komisi IV DPR RI. Ia mengakui, khususnya dari November 2017, serangan hama WBC cukup luar biasa, baik dari segi area, maupun dampaknya bagi produktivitas gabah. Kendati secara produksi gabah masih surplus, namun ia khawatir serangan hama wereng ini akan terjadi pada masa produksi ke depannya.

“Dari catatan, produksi gabah kita memang tetap terjaga. Kemudian petani kita juga kan sudah diasuransi. Untuk ke depan, kita tetap menjaga. Apalagi daerah ini masyarakatnya sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Semoga ke depannya petani tidak merugi dan menurunkan kesejahteraan petani,” harap Bupati Hendra.

Data Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi Sumsel menunjukkan, dari total area lahan pertanian Musi Rawas seluas 22 ribu hektar, hama wereng menyerang setidaknya lahan pertanian seluas 293 hektar pada Januari-September 2018.

Sebagai langkah pencegahan penyebaran, Dinas Pertanian Sumsel telah melakukan penyemprotan pestisida sebanyak 599 kali pada lahan seluas 5500 hektar dalam kurun waktu Oktober 2017 hingga September 2018 ini.

Kunspek ini juga diikuti oleh Anggota Komisi IV DPR RI Oo Sutisna (Gerindra), Andi Akmal Pasluddin (PKS), Kasriyah (Hanura), dan Fauzih H. Amro (Hanura). Dalam kesempatan ini, Tim Kunspek Komisi IV DPR RI juga didampingi Inspektur Jenderal Kementan Justan Ridwan Siahaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Maman Suherman, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementan. ■ sf



Foto: Sofyani | od.

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI ke Desa P1. Mardiharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumsel



Foto: Natasya | oc

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis (tengah) memimpin Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Komisi V Pastikan Instrumen BMKG Layak dan Berfungsi

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyampaikan, peralatan dan instrumen yang digunakan di Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dapat dipastikan dalam kondisi baik, layak, dan dapat berfungsi. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan peninjauan terkait peralatan yang digunakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), agar mampu menyampaikan informasi yang akurat baik kepada masyarakat ataupun untuk penerbangan.

“ Kita tidak ingin terjadi kejadian yang sama seperti di Palu. Kita mendapatkan bahwa beberapa perangkatnya termasuk peralatan pendeteksi tsunami di Palu itu tidak berfungsi. Sementara kami sering kali datang berkunjung dan mendapatkan laporan dari BMKG bahwa perangkat dan peralatannya itu masih layak dan berfungsi dengan baik.” terang Fary saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumsel, Jumat (12/10).

Pada kesempatan tersebut, legislator Partai Gerindra itu meminta agar BMKG dapat memaparkan kondisi sebenarnya

seluruh peralatan dan instrumen yang digunakan dalam mendeteksi kondisi alam. Sehingga, baik DPR RI dan BMKG dapat mengetahui berapa jumlah peralatan yang perlu diperbaiki dan harus dipenuhi di setiap daerah.

“Untuk itu maka kita minta supaya BMKG betul-betul terbuka saat Rapat Dengar Pendapat antara kita dengan Kepala BMKG. Kemarin kita menolak anggaran yang diusulkan oleh BMKG karena masih belum memberikan gambaran kepastian tentang perangkat atau peralatan yang rusak dan peralatan yang harus diperbaiki, serta yang belum ada ya harus diadakan,” tegas Fary.

Selain itu, ia juga menyoroti

masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II ini. Fary mendapatkan informasi dari Kepala BMKG Palembang, bahwa mereka masih kekurangan SDM yang mampu melakukan *maintenance* (perbaikan, RED) jika alat-alat mengalami kendala. Oleh karena itu, pihaknya mendorong BMKG untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi SDM, sehingga staf BMKG mampu memberikan informasi terkait kondisi alam secara akurat.

“Saya kira tentu staf BMKG yang ada harus diberdayakan dan dilatih. Lalu BMKG perlu melakukan audit kalau memang dibutuhkan, mau tidak mau. Karena negara ini memiliki potensi gempa di seluruh wilayah, sehingga kita harus mencari jalan keluarnya agar kebutuhan SDM bisa terpenuhi. Hal ini penting mengingat informasi yang diberikan BMKG menyangkut keselamatan dan keamanan seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali penerbangan,” tutup legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. ■ nap/sf

Komisi V DPR RI menilai pendataan aset yang dimiliki PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Indonesia Kementerian Perhubungan RI masih rancu dan banyak masalah. Melihat kondisi itu, Wakil Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo memastikan, pihaknya akan segera memanggil Direksi PT. KAI dan Dirjen Perkeretaapian.

Sigit mengatakan, pihaknya menginginkan permasalahan dan kerancuan kepemilikan aset PT. KAI dan pada Dirjen Perkeretaapian segera diselesaikan, dan pengelolaannya dari aset-aset tersebut dapat dijalankan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bahkan, terkait aset ini, perlu pembahasan khusus yang holistik antara Komisi V DPR RI dengan PT. KAI dan Dirjen Perkeretaapian.

“Terkait pengelolaan aset, masih menjadi PR (pekerjaan rumah), karena menurut Undang-Undang 23 Tahun 2007, aset itu sebetulnya harus dipisahkan antara aset yang dimiliki Dirjen Perkeretaapian dengan aset yang dimiliki PT. KAI,” katanya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Jawa Timur, Kamis (11/10).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, kepemilikan aset harus jelas terpisah, sehingga nanti tidak ada kerancuan. Dari amanat UU, untuk membuat dua badan hukum, berupa satu Badan Hukum Pengusahaan Sarana Perkeretaapian dan Badan Hukum Pengusahaan Prasarana Perkeretaapian.

“Jadi, nanti yang bikin rel kereta api bukan lagi Dirjen Perkeretaapian, tapi badan hukum atau perusahaan sendiri. Nanti yang lewat rel ini PT. KAI. Dan nantinya tidak hanya PT. KAI yang memanfaatkan rel itu. Ada PT-PT yang lain yang mungkin juga mempunyai sarana yang digunakan untuk mengangkut penumpang di atas rel yang dimiliki oleh perusahaan yang membuat rel itu,” jelas Sigit.

Legislator dapil Jawa Timur itu menambahkan, pendataan aset perkeretaapian ini masih belum selesai. Progresnya lama karena menghitung dan menentukan aset bukan pekerjaan mudah. Bahkan, ada banyak aset yang tidak tercatat. Untuk itu, menurutnya terkait aset ini perlu pembahasan khusus. ■ as/sf



Foto: Agung Iod

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Jawa Timur.

Data Aset Masih Rancu, Komisi V Akan Panggil PT. KAI dan Dirjen Perkeretaapian





Foto: Agung | od

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir.

Komisi VII Temukan Sejumlah Masalah Pengolahan Limbah di Jabar

Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI menemukan sejumlah permasalahan saat inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa perusahaan pengolahan limbah di Bekasi dan Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ketua Panja Limbah dan Lingkungan Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya melakukan sidak ke beberapa perusahaan pengolahan limbah industri untuk melihat fakta kegiatan pengolahan limbah industri.

“Hal itu sekaligus membuktikan fungsi pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan setelah kami lakukan sidak, kami menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengolahan limbah tersebut,” ungkap Nasir usai meninjau kondisi PT.

Pengolahan Limba Industri Bekasi (PLIB), Bekasi, Jawa barat, Kamis (11/10).

Temuan tersebut, salah satunya adalah produksi yang dikeluarkan belum memiliki izin atau izinnya masih dalam proses. Ditambahkan Anggota Panja Limbah dan Lingkungan Yulian Gunhar menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan limbah ada enam

item, seperti penghasil, penyimpanan sementara, pengangkutan, pengumpul, dan pengolahan dan pemanfaatan limbah.

Sementara ini, PT. PLIB hanya memiliki izin di tahap pengolahan dan pemanfaatannya saja. Sementara tahapan lainnya masih dalam proses perizinan, namun sudah dilakukan pengoperasian. Oleh karena itu, pihaknya akan menyerahkan kasus ini ke Bagian Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI berjalan dengan baik. ■ ayu/sf

Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong terus mendorong bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi, maupun wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah lebih cepat tersalurkan, terutama ke pengungsi-pengungsi yang selama ini belum tersentuh bantuan.

“Kalau kita lihat, kerusakannya luar biasa. Karenanya, DPR RI merasa perlu sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat Sulteng, terutama Palu, Donggala dan Sigi,” kata Ali Taher saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Dinas Sosial Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/10).

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, hal pertama

yang harus dilakukan adalah *emergency response*, dengan terus mengirimkan bantuan sampai 14 hari ke depan, karena masih banyak korban yang belum ditemukan dan dievakuasi.

Kedua, ia menekankan aspek anggaran tahun 2019 untuk masa rekonstruksi dan rehabilitasi. “Untuk tahun ini ada dana siap pakai Rp 4 triliun dan untuk tahun 2019 akan kita naikkan

menjadi Rp 6,5 triliun,” ujar Ali Taher.

Ali Taher berharap, masyarakat Sulteng bisa kembali melaksanakan aktivitas kesehariannya, terutama menumbuhkan perekonomian dan mendapatkan rasa nyaman. Ia mengatakan, pihaknya datang ke Sulteng untuk mendapatkan data yang valid mengenai tingkat kerusakan dan jumlah korban.

“Ini perlu diteliti kembali, kemudian kita akan bicara dengan Kementerian Sosial dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Insya Allah akan ada upaya yang lebih cepat,” harap legislator dapil Banten itu.

Ali Taher bersama 16 Anggota Dewan lainnya, selain mendatangi tenda tempat penyembuhan trauma milik Kementerian Sosial di Dinas Sosial Provinsi Sulteng, juga mendatangi beberapa lokasi terdampak bencana paling parah di Palu, meninjau IAIN Palu, serta menemui Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. ■ eno/sf



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong tinjau bantuan bencana Palu.

Foto: Kresno | od.

Komisi V Dorong Pemerintah Serious Tangani Persoalan Banjir Aceh Singkil

Komisi V DPR RI menyoroti persoalan banjir di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yang hingga kini belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah pusat. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Aceh Singkil berharap, pemerintah pusat serius menyelesaikan persoalan banjir di Aceh Singkil, sehingga tidak terjadi tiap tahunnya.

mendatang.

Irmawan berjanji akan mendorong kementerian terkait untuk segera menangani persoalan banjir di Aceh Singkil ini. Karena persoalan banjir jika terus terjadi tiap tahunnya, bisa mengganggu perekonomian masyarakat setempat.

“ Kita datang langsung ke sini untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa infrastruktur yang ada di Kabupaten Singkil. Ternyata ada banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah penanggulangan banjir yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian serius,” ungkap Irmawan di sela-sela peninjauan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Kamis (11/10).

Lebih lanjut, legislator PKB itu menyampaikan bahwa persoalan banjir di Aceh Singkil sudah terjadi dari tahun ke tahun, dan setiap kali banjir selalu memakan korban. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat serius menyelesaikan persoalan banjir di Aceh Singkil ini, sehingga banjir di Aceh Singkil tidak akan terulang lagi di masa



Anggota Komisi V DPR RI Irmawan (bertopi).

Foto: Singgih | od.

Sarpras Madrasah Dinilai Kurang Layak



Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq.

Foto: Taufan | od.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hamka Haq menilai masih banyak sarana dan prasarana madrasah di Indonesia yang kurang layak, sehingga penting untuk meningkatkan kualitas, agar menjadi madrasah lebih maju. Kendati ada sarpras yang mencukupi, namun khusus di daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, masih perlu mendapat perhatian.

Menurutnya, pembinaan madrasah harus ditangani bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah, karena banyak madrasah yang dianggap sebagai kewenangan Kementerian Agama dan bukan tanggung jawab dari pemerintah setempat.

“Banyak sekolah agama yang dianggap sebagai wilayah Kementerian Agama dan

“Kita akan dorong kementerian terkait untuk serius dan dapat mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan persoalan banjir di Aceh Singkil,” dorong Anggota DPR RI dapil Aceh ini.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Aceh Singkil Dulmusrid berharap pemerintah pusat bisa membantu menyelesaikan persoalan banjir di Aceh Singkil, terutama menormalisasi sungai-sungai di Kabupaten Aceh Singkil yang sudah dangkal, agar ketika hujan turun sungai tidak meluap.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Aceh Singkil terletak di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sangat luas dan panjang, mulai dari Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Selatan, termasuk, Pakpak Bharat, Dairi, dan Humban Tobasa yang semua airnya mengalir dan bermuara ke Aceh Singkil. Sehingga ketika hujan lebat, Kabupaten Singkil selalu dilanda banjir karena sungai-sungai di Singkil kelebihan debit air dan meluap.

Dalam APBN TA 2018, alokasi Anggaran untuk Kegiatan Penanggulangan Banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp 11,350 miliar. Sementara itu, untuk kegiatan Supervisi Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp 650 juta. ■ skr/sf

tidak bersifat kedinasan. Sehingga pemerintah daerah tidak terlalu memberikan perhatian besar terhadap sekolah agama,” kata Hamka saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (11/10).

Namun, legislator PDI-Perjuangan itu berpendapat, tidak semua pemerintah daerah abai terhadap kondisi madrasah. Beberapa pemda pun sudah mulai memberikan perhatian secara tepat, dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.

“Tidak semuanya pemerintah daerah seperti itu. Contohnya Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan. Di sini pemerintah setempat memberikan tanah berupa hibah untuk dipakai, walaupun sertifikatnya masih belum ada,” imbuh legislator daerah pemilihan Jawa Timur itu. ■ tn/sf

Komisi X Terima DIM RUU Ekonomi Kreatif dari Pemerintah



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menerima DIM RUU tentang Ekonomi Kreatif dari Menteri Perdagangan.

Foto: Andri | oc

Komisi X DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif dari pemerintah. DIM tersebut diserahkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mewakili pemerintah kepada Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Kementerian Pariwisata, perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Kementerian PAN dan RB, dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.

RUU tentang Ekonomi Kreatif merupakan usul dari DPD RI yang telah ditetapkan dalam Prolegnas 2015-2019 dengan urutan ke-93. Selanjutnya berdasarkan surat Pimpinan DPR RI (Wakil Ketua DPR RI/KORINBANG) tanggal 1 Juni 2016 No. PW/09072/DPR RI/VI/2016, Komisi X DPR RI ditugaskan untuk membahas RUU Ekonomi Kreatif bersama pemerintah,” jelas Djoko saat memimpin Raker di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/10).

Djoko menjelaskan penetapan RUU Ekonomi Kreatif dalam Prolegnas 2015-2019 tidak lepas dari fakta empiris bahwa ekonomi kreatif mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai negara dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian negaranya, termasuk Indonesia yang berpandangan bahwa potensi ekonomi kreatif (ekraf) dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.

“Indonesia melihat potensi Ekraf untuk dikembangkan sebagai penopang perekonomian nasional, namun masih ada permasalahan yang ditemukan dalam pengembangan ekraf, utamanya tentang ekosistem ekraf yang belum terbentuk secara baik. Nah untuk itu RUU ini hadir,” tutur Legislator Partai Demokrat itu.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mewakili pemerintah mengapresiasi lahirnya RUU Ekonomi Kreatif yang diusulkan DPD RI, dan menyatakan kesiapan untuk melakukan pembahasan bersama Komisi X DPR RI yang telah mendapatkan tugas dari Pimpinan DPR RI.

“Kami sangat mengapresiasi DPR yang telah mengambil langkah-langkah untuk menyusun RUU Ekonomi Kreatif. Hal ini mencerminkan perhatian yang sangat besar dari DPR sebagai wakil rakyat mengenai pentingnya pengaturan bagi warga negara, khususnya pelaku ekraf dalam rangka menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif, arah pengaturan RUU melingkupi SDM terpadu ekraf, Infrastruktur terpadu ekraf, kewirausahaan ekraf dan promosi ekraf, kelembagaan ekraf dan pembiayaan. ■ rnm/sf

Kesadaran Masyarakat Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masih Rendah

Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melihat masih terdapat beberapa permasalahan pada BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tidak efektifnya pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan meskipun telah didukung dengan payung hukum. Selain itu, masih adanya keberatan pemberi kerja/pengusaha, khususnya sektor kecil dan mikro terhadap persentase iuran yang harus mereka bayarkan.

amanat Undang-Undang (UU) BPJS. “Masukan ini akan kami rumuskan dan sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, sebagai rekomendasi dalam upaya pencapaian jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat UU BPJS,” tegas Abidin

Lebih lanjut legislator dapil Jatim itu mengatakan, Sumbar sebagai salah satu

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Selasa (16/10). Dalam pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumbar, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja, APIATI, perwakilan pekerja pelabuhan, *driver online*, pekerja pasar, dan profesi notaris di Sumbar itu, Panja BPJS Ketenagakerjaan ingin mengetahui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Sumbar.

“Belum optimalnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut membuktikan rendahnya tingkat kesadaran perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebab program BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan beberapa tahun terakhir dan sosialisasi terkait ini sudah berjalan. Untuk itu, kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan secara langsung tentang perluasan kepesertaan, ketaatan perusahaan serta manfaat investasi bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sangat disayangkan kalau tenaga kerja kita tidak dilindungi,” ungkap Abidin.

Legislator PDI-Perjuangan itu berharap, kunjungan ini mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk memperdalam masalah belum optimalnya capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan peran perusahaan serta masyarakat dalam pelaksanaan



Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri.

Belum optimalnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut membuktikan rendahnya tingkat kesadaran perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebab program BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan beberapa tahun terakhir dan sosialisasi terkait ini sudah berjalan

provinsi yang dipilih untuk dikunjungi Panja BPJS Ketenagakerjaan memiliki jumlah penduduk sekitar 5,322 juta jiwa, dengan angkatan kerja ada sebanyak 2,74 juta orang (data BPJS 2017) serta 88.546 tenaga kerja aktif dari 4.063 perusahaan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Turut serta dalam kunspek ini Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning (F-PDI Perjuangan), Delia Pratiwi Br. Sitepu (F-Golkar), Putih Sari (F-Gerindra), Zulfikar Achmad (F-Demokrat), Aryanto Munawar (F-PKB), Siti Masrifah (F-PKB) dan Irma Suryani (F-NasDem). ■ [ria/mp/sf](#)

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kalsel Masih Minim

Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI mendapatkan informasi bahwa tingkat partisipasi pekerja dalam keikutsertaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat minim, tepatnya di bawah 30 persen. Bahkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi yang terendah di Kalimantan.

Panitia Kerja (Panja) BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI mendapatkan informasi bahwa tingkat partisipasi pekerja dalam keikutsertaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat minim, tepatnya di bawah 30 persen. Bahkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi yang terendah di Kalimantan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (16/10). Kunspek ini dalam rangka pengawasan terhadap program-program BPJS Ketenagakerjaan di Banjarmasin.

“Beberapa faktor penyebab rendahnya keterlibatan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah tingkat sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, khususnya sektor informal, masih sangat rendah. Sebagaimana disampaikan perwakilan UMKM, mereka tidak tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Syamsul.

Selain itu, jelas legislator Partai Golkar ini, pengawas tenaga kerja di Kalimantan yang sangat terbatas. Ada hampir 5.000 perusahaan hanya diawasi oleh 32 tenaga pengawas, artinya 1 orang pengawas mengawasi sekitar 130 perusahaan. Menurutnya, ini sangat tidak masuk akal, sehingga hal ini harus menjadi perhatian.

“Meskipun pemerintah daerah setempat telah memberikan dukungan secara normatif, tetapi penegakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu diragukan

untuk dikontrol.

“Jadi BPJS Ketenagakerjaan memang harus melakukan gerakan yang sifatnya masif, mulai dari aspek sosialisasi, kemudian pada penegakan hukum terhadap



Anggota Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri.

Beberapa faktor penyebab rendahnya keterlibatan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah tingkat sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat, khususnya sektor informal, masih sangat rendah.

efektifitasnya, karena pengawasan sangat lemah, dan tingkat kedisiplinan perusahaan masih kurang,” tambah Syamsul.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengakui sulitnya mengontrol anggotanya, apakah mereka disiplin dan taat terhadap aturan-aturan BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun mengakui, anggota mereka ada yang bekerja di sektor perkebunan, hutan, dan pertambangan, sehingga sangat sulit

perusahaan-perusahaan yang tidak taat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegas legislator dapil Sulawesi Selatan itu.

Ada pula perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya secara sentralistik, sehingga tidak termonitor di tingkat daerah. Dengan temuan ini, Panja BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI selanjutnya akan mendiskusikan dengan direksi terkait. Ini menjadi masukan yang sangat berharga untuk Panja agar lebih menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.

“Dalam rangka meningkatkan keikutsertaan, BPJS Ketenagakerjaan harus menunjukkan secara konkret apa saja keuntungan yang didapat bagi pekerja yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS, untuk itu sosialisasi harus diintensifkan kepada masyarakat dan *law enforcement* harus ditunjukkan,” tutup Syamsul.

■ cas/mp/sf



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno bersama Tim Kunspek Komisi XI meninjau pabrik rokok kretek di Jawa Timur.

Produksi Rokok Manual Harus Dilindungi Pemerintah

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno meminta pemerintah untuk tetap melindungi produsen rokok yang menggunakan cara tradisional atau manual, yang menggunakan tenaga kerja ibu-ibu, bukan tenaga mesin. Pasalnya, jika perusahaan itu beralih ke mesin, maka akan terjadi pengangguran besar-besaran.

Dengan beralih ke mesin maka ribuan tenaga kerja terancam pengangguran. Ada kurang lebih tujuh ribu tenaga kerja akan terhapus,” tandasnya usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI meninjau proses produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT)

PT. Anugrah Mutiara Luhur Indonesia yang memproduksi rokok Sampoerna di Jombang, Jawa Timur, Jumat (12/10).

Selama kunjungan, Tim Kunspek Komisi XI DPR RI didampingi Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret (MPS) Joko Wahyudi, Sekjen Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia Saiduddin

Zuhri, HM Sampoerna, Gudang Garam, Direktur Cukai, Direktur PPS, Kakanwil Jatim, dan sejumlah mitra kerja Komisi XI DPR RI.

Tim Komisi XI DPR RI melihat langsung proses produksi dari awal hingga akhir pengemasan, dan berkesempatan berbincang dengan sejumlah para pegawai yang sedang melakukan proses pelinting, pengguntingan ataupun pengepakan rokok kretek tersebut.

Lebih lanjut, Soepriyatno melihat, industri rokok di Tanah Air banyak terdapat permasalahan. Mereka menghadapi tantangan dari dunia



Foto: Rumi | od

kesehatan, di sisi lain banyak petani tembakau, petani cengkeh yang harus dihidupi juga. “Ada sisi dilematis, maka harus ada keseimbangan dalam penyelesaiannya,” tuturnya.

Bagi Komisi XI DPR RI, sambung legislator Partai Gerindra ini, adalah memastikan industri rokok harus menyerap tembakau dan cengkeh dari Indonesia.

“Kalau dikatakan bahwa sigaret kretek mesin ternyata banyak disukai konsumen, apalagi menggunakan produk lokal berupa tembakau dan cengkeh dari dalam negeri. Meski penerimaan cukai kecil, tapi industri hulunya bagus, tembakau dan cengkeh petani bisa diserap dan pada gilirannya menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret (MPS) Joko Wahyudi meminta kepada pihak-pihak yang mendiskreditkan persoalan rokok, dimana peringatan bahwa rokok dapat membunuh, agar bisa berhenti meresahkan masyarakat.

“Karena menurut saya, jika rokok itu menakutkan ada hal lain yang lebih mematikan, yakni gula juga bisa membunuh dengan berbagai penyakit,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, pihaknya berharap kepada pemerintah mengenai cukai harus pada strata dan harus ada perbedaan tarif peta cukai antara Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT), karena di strata penghasilannya tertentu sangat berbeda. Jika tarif cukai harus disamakan, ini akan menjadi bumerang sekali bagi industri kecil.

Di Jawa Timur sendiri penerimaan cukai Jatim memperoleh kurang lebih Rp 90,5 triliun dari target Bea Cukai sekitar Rp 175 triliun. Jika di rata-rata persen mencapai 51,7 persennya diperoleh dari Provinsi Jatim. Sementara postur Nota Keuangan RAPBN TA 2019 pemerintah menerapkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1781,0 triliun, terdiri dari Rp 1.572,3 triliun penerimaan pajak dan penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp 208,7 triliun. ■ rni/sf



Foto: Andri | od

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI TB. Soenmandjaja.

MKD Perlu Bersinergi dan Kerja Sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI TB. Soenmandjaja mengatakan, MKD perlu membangun sinergi dan kerja sama yang baik dalam konteks sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam Kunjungan Kerja ke Jawa Tengah, Soenmandjaja berharap adanya kerja sama dari Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jateng untuk memberi masukan terhadap Kode Etik dan Tata Beracara MKD.

“MKD mengharapkan kerja sama dengan jajaran Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Jateng, untuk memberikan masukan dan mensosialisasikan tentang bagaimana Kode Etik dan Tata Beracara yang baik dalam rangka tugas-tugas yang dapat dilakukan secara profesional dan penuh dengan tanggung jawab sebagai wakil rakyat,” kata Soenmandjaja saat pertemuan dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Condoro Kirono dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Sadiman beserta jajarannya, di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/10).

Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menjaga keluhuran martabat Dewan, MKD bisa melakukan kerja sama dengan lembaga lain, termasuk aparat penegak hukum. Soenmandjaja menjelaskan hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 122A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang isinya MKD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dapat bekerja sama dengan lembaga lain.

“Kerja sama di sini dapat dilakukan terutama dengan lembaga yang terdapat irisan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Salah satu lembaga yang sering terdapat irisan dalam pelaksanaan tugas ini diantaranya adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Meski demikian, kami tidak akan mengintervensi. Baik itu terkait proses hukum yang tengah dilakukan aparat penegak hukum, ataupun proses penegakan kode etik yang tengah dilakukan oleh MKD terhadap Anggota Dewan,” tegas legislator PKS itu. ■ man/sf

Banggar Sepakati Asumsi Makro 2019



Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja antara Banggar bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).

Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah secara tegas mengambil alih jalannya rapat kerja yang berlangsung alot ini. Dia mengingatkan, pembahasan APBN ini harus tuntas sebelum akhir Oktober 2018. Sehingga tidak adalah pembahasan yang berbelit terkait perubahan nilai tukar Rupiah. "Batas pembahasan APBN harus tuntas 29 Oktober nanti. Pekan depan kita harus kembali ke komisi untuk membahas detail," tegas Said.

Adapun asumsi makro yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi 3,5 persen, tingkat suku bunga SPN 3 Bulan 5,3 persen, nilai tukar rupiah 15.000 per dolar AS, harga minyak mentah 70 dolar AS per barel, *lifting* minyak 775 ribu barel per hari, *lifting* gas 1.250 ribu barel per hari dan *cost recovery* 10,22 miliar dolar AS. ■ **hs/mp**

Setelah melalui perubahan, akhirnya Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyetujui perubahan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Salah satunya mengenai perubahan nilai tukar rupiah menjadi Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Bahas Transparansi Parlemen, Sekjen DPR Hadiri Sidang ASGP di Jenewa

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menghadiri *Sidang Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP)* yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 15 - 18 Oktober 2018. Sidang ini membahas pentingnya transparansi parlemen terhadap rakyat atau konstituen.

“Transparansi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penyediaan data, buku, dokumen, jurnal dan manuskrip di perpustakaan parlemen, masyarakat dapat menghadiri sidang paripurna dari bangku pengunjung,” jelas Indra usai menghadiri sidang ASGP yang dilaksanakan paralel dengan the 139th session of the Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss.

Indra menjelaskan, parlemen dapat melakukan transparansi melalui

penggunaan teknologi seperti website dimana rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada parlemen melalui situs parlemen.

“Parlemen juga bisa mengadakan diskusi panel dengan publik, akademisi dan masyarakat untuk mereview undang-undang tertentu dan juga mengadakan program parlemen remaja guna mengajak para pemuda untuk berpartisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dan menghargai perbedaan pendapat,” paparnya.

Untuk diketahui, sidang ASGP akan



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menghadiri Sidang Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) di Jenewa.

berlangsung selama empat hari dengan berbagai agenda sidang dengan menghadirkan para pembicara dari beberapa Sekretaris Jenderal Parlemen negara-negara Anggota IPU. Forum ini untuk berbagi pengalaman sebagai supporting system dalam memberikan dukungan terhadap tugas-tugas parlemen.

Turut hadir Sekretaris Jenderal Parlemen Iran, Mr Gholamreza Nouri Ghezalgeh, Sekretaris Jenderal Parlemen Kuwait Allam Ali Al-Kandari, Sekretaris Jenderal Parlemen Maroko Najib El-Khadi dan Sekretaris Jenderal Parlemen Georgia Givi Mikanadze. ■ **ann/mp**



Foto: Iwan | Od

Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso bersama Ketua Yayasan Semen Padang dan jajaran manajemen Kantor Perwakilan PT. Asuransi Jasindo, di SPH Padang.

BURT Tinjau Pelaksanaan Program Jamkestama di SPH Padang

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi 560 Anggota DPR RI beserta keluarganya yang dilaksanakan Rumah Sakit (RS) Semen Padang, atau yang dikenal dengan Semen Padang Hospital (SPH) di Padang, Sumatera Barat, sebagai rumah sakit provider PT. Asuransi Jasindo.

Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan, BURT DPR RI berkepentingan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan program Jamkestama. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah berkunjung secara langsung ke RS *provider*, guna memastikan layanan Jamkestama telah memenuhi standar sebagaimana sesuai peraturan dan ketentuan yang ada.

“Seiring dengan telah berjalannya program Jamkestama tersebut, ternyata masih banyak ditemui berbagai permasalahan di lapangan,” kata Agung saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja (Kunker) BURT dengan Ketua Yayasan Semen Padang beserta

jajaran manajemen Kantor Perwakilan PT. Asuransi Jasindo, di SPH Padang, Sumbar, Rabu (17/10).

Legislator Partai Demokrat ini memberi contoh, salah satu permasalahan yang seringkali muncul adalah mengenai proses administrasi di RS *provider*. Bahkan tidak sedikit dari RS *provider* belum memiliki prosedur berimplikasi kepada terhambatnya proses pengobatan bagi Anggota DPR RI.

Agung menambahkan, Anggota DPR RI sebagai pejabat negara termasuk anggota keluarganya diberikan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan yang merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Pemerintah telah menunjuk PT. Asuransi Jasindo sebagai pihak pelaksana yang menjalankan program Jamkestama untuk Anggota DPR RI beserta keluarganya.

“Karena, mengingat tugas yang diemban oleh Anggota DPR RI sangatlah besar, maka jaminan kesehatan bagi Anggota DPR RI menjadi suatu keharusan dan harus dikelola sebaik mungkin. Alhamdulillah, kerjasama Jasindo dengan beberapa rumah sakit *provider* di berbagai daerah cukup baik,” jelas legislator dapil Jawa Barat itu.

Terkait layanan dan fasilitas di SPH Padang, Agung menilai sangat baik dalam memberi layanan. SPH Padang melayani masyarakat umum dengan sangat baik. Agung juga mengapresiasi manajemen SPH yang mendesain bangunannya tidak seperti RS, namun tampak seperti mall. Ada fasilitas seperti pertokoan, kafe, dan tempat bermain anak. Semuanya memberi fasilitas yang nyaman bagi pasien yang datang. ■ iw/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (17/10), Foto : JayadijAndv



Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN / Bappenas dan Menteri Hukum dan Ham dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdulloh.

Rabu(17/10), Foto : RunijAnd



Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir ke PT. Indo Bharat Rayon di Kabupaten Purwakarta, Prov. Jawa Barat. Kamis(18/10), Foto : GeraldjAnd